

**EFEKTIVITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI PEMERINTAH PROVINSI
RIAU BAGI MASYARAKAT TERKENA DAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN
TANGKERANGLABUAI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2020**

Oleh: Christy Natalica

christynatata@gmail.com

Dosen Pembimbing: Sofyan Hadi, S.Sos, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru

28293Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The implementation of the Riau Provincial Government's Direct Cash Assistance (BLT) program in Pekanbaru City caused turmoil in the community, especially in Tangkerang Labuai Village, Bukit Raya District, in terms of disbursing BLT related to differences in KK/KTP numbers registered with channeling banks and the occurrence of BLT deductions at one of the banks. distribution bank. This indicates that the Pekanbaru City Government and stakeholders have not been effective in distributing the Riau Provincial Government BLT.

This study aims to describe how the effectiveness of the Riau Provincial Government Direct Cash Assistance (BLT) in supporting people's purchasing power in the midst of the economic downturn due to COVID-19. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of this study are that it can be seen that the effectiveness of the implementation of the Riau Provincial Government's BLT program has not been maximized in its implementation. This is due to several things, namely the absence of continuous socialization and only carried out by the village government regarding the Riau Provincial Government BLT. The initial data collection carried out for KPM is not well targeted and uneven, so there are still KPM members who do not meet the target criteria that have been set. Many KPMs have difficulty in taking BLT funds, lack of understanding of KPMs regarding complaints regarding problems related to taking BLT.

Keyword : Program Effectiveness, Riau Provincial Government Cash Direct Aid

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Mulai dari aspek sosial, serta ekonomi khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 705/IV/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau Tahun 2020.

Maka Gubernur Riau mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Kepala Dinas Sosial Riau Dahrius Husin mengatakan, bantuan berupa uang tunai tersebut akan diberikan kepada masyarakat rentan miskin di Riau. Tujuan dari bantuan ini menjadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat COVID-19. Dengan sejumlah bansos tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban keluarga miskin dan rentan dari dampak ekonomi akibat penyebaran virus COVID-19. Penyaluran Bantuan Keuangan bersifat Khusus dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap

dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 BAB III Pasal 5 Mengenai Penggunaan, Sumber dan Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

1. Bantuan Keuangan bersifat Khusus digunakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas jaring pengamanan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai sebesar RP.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga Per Bulan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Penerima bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keluarga penerima BSP murni, dan non DTKS.
3. Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pemerintah Kota Pekanbaru memperkirakan setidaknya ada 40.000 KK masyarakat miskin, yang merupakan gabungan masyarakat miskin, rentan miskin, dan miskin

baru, akibat penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 BAB I Pasal I, secara singkat menjelaskan, Bantuan Sosial Pangan murni (BSP murni) adalah penerima program bantuan sosial pangan (sembako) yang tidak mendapatkan bantuan lainnya dari Kementerian Sosial RI. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah masyarakat miskin lama yang telah didata oleh Dinsos sebelum pandemi, sementara Non-DTKS adalah masyarakat miskin baru yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Bansos Provinsi dalam bentuk bantuan berupa TOP UP Rp. 300.000/KK untuk 3 Bulan yang di mana sumber dananya berasal dari APBD. Sasaran dari program Bansos Provinsi ini yaitu Non DTKS, Keluarga Karantina Positif COVID-19, UMKM/IKM Omzet Turun >50%, Warga Pendatang dan Bekerja di Riau, dan Warga Terdampak yang Belum mendapat Bantuan APBN&APBD KAB/KOTA (Rentan Miskin dan Miskin Baru).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menganggarkan Rp198 Miliar untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 di Provinsi Riau. Anggaran tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per Kepala Keluarga (KK). Jumlah penerima

BLT di Kota Pekanbaru yang dikonfirmasi sebanyak 45.625 KK.

Masalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Pekanbaru, memunculkan beberapa masalah di Kecamatan Bukit Raya, warga Tangkerang Labuai bersama ratusan warga lain protes dengan aturan yang dinilai membingungkan karena aturan yang disampaikan pihak bank sebagai penyalur terkait harus samanya nomor kartu keluarga (KK) dan nomor NIK. Dari 368 calon penerima BLT itu, hanya ada beberapa yang bisa dicairkan, karena beruntung nomor KK dan NIK penerima persis dan tidak salah tiga digit. Kelurahan yang dalam hal ini hanya sebatas fasilitator juga mengaku bingung dengan aturan tersebut.

Tidak hanya itu terjadi pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga penerima BLT Pemprov oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru, potongan sebesar Rp. 50.000. Pihak Pemko sebagai penyalur seharusnya tidak melepaskan sepenuhnya proses penyaluran pada pihak ketiga. Tetap harus ada pengawasan berkelanjutan. Sehingga penyerahan bantuan tidak menyisakan polemik seperti saat ini. Bahkan tidak sedikit masyarakat penerima yang mengeluhkan pemotongan tersebut. BLT ini merupakan

Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Riau untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Yang mana, penyalurannya kepada warga dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui BPR.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dari Pemerintah Provinsi Riau Bagi Masyarakat Terkena Dampak COVID-19 di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tahun 2020.?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dari Pemerintah Provinsi Riau Bagi Masyarakat Terkena Dampak COVID-19 di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2020.

KERANGKA TEORI

a. Konsep Program

Program merupakan suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang mencakup pengesahan/legislasi, pengorganisasian, dan penerangan atau penyediaan sumber-sumber daya.

Menurut Pusida, R. dkk (2018:1) (dalam Harbani Pasolong, 2008:92) menjelaskan bahwa program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Arikunto (1988:1) mendefinisikan bahwa program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Arikunto (1988:2) menjelaskan bahwa program dapat bermacam-macam wujudnya ditinjau dari berbagai aspek, yakni tujuan, jenis, jangka waktu, luas, sempitnya, pelaksana, sifatnya, dan sebagainya.

1. Ditinjau dari tujuan, ada program yang kegiatannya bertujuan mencari

keuntungan (kegiatan komersial) dan ada yang bertujuan sukarela (kegiatan sosial).

2. Ditinjau dari jenis, ada program pendidikan, program koperasi, program kemasyarakatan, program pertanian, dan sebagainya, yang pengklasifikasiannya didasarkan atas isi kegiatan program tersebut.
3. Dilihat dari jangka waktu, ada program berjangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
4. Ditinjau dari luasannya, ada program sempit, hanya menyangkut variabel yang terbatas dan program luas, menyangkut banyak variabel.
5. Ditinjau dari pelaksana, maka ada program kecil yang hanya dilaksanakan oleh beberapa orang, dan program besar yang dilaksanakan oleh berpuluh bahkan beratus orang.
6. Ditinjau dari sifatnya, ada program penting dan program kurang penting. Program penting adalah program yang dampaknya menyangkut nasib orang banyak mengenai hal yang vital sedangkan program kurang penting adalah sebaliknya.

Dari beberapa aspek di atas menjelaskan bahwa untuk meninjau sebuah program dapat bermacam-macam wujudnya dari berbagai aspek, yaitu ditinjau dari tujuan yang merupakan meninjau program berdasarkan tujuannya apakah bertujuan untuk mencari keuntungan atau untuk kegiatan sosial, yang kedua yaitu ditinjau dari jenis programnya, yang ketiga yaitu ditinjau dari jangka waktunya, yang keempat yaitu ditinjau dari luasannya, yang kelima yaitu program ditinjau dari pelaksanaannya, dan yang keenam yaitu program ditinjau dari sifatnya.

b. Pendekatan Efektivitas

Luas, Jessica dkk (2017:2) (dalam Lubis dan Husseini, 1987:55) menyebutkan ada 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

Pendekatan sumber (resource approach), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan internal atau mekanisme organisasi.

Pendekatan sasaran (goals approach) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana. Menurut Makmur (2008:8) menyebutkan bahwa penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan Selanjutnya menurut Sinambela (2008:82) mengemukakan bahwa masyarakat merupakan aktor penting dalam suatu proses penentu suatu kebijakan atau program pembangunan. Peran serta publik tidak hanya diartikan sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat ke dalam konteks proses penentu kebijakan publik.

Dari tiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang mampu memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai sasarannya. Selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian suatu tujuan dalam suatu program dibutuhkan ukuran efektifitas untuk mengukur keberhasilan sebuah program.

c. Pengukuran Efektivitas Program

Pengukuran sangat diperlukan dalam pelaksanaan sebuah program atau kegiatan suatu organisasi agar dapat mengetahui

sejauh mana langkah efisiensi yang dilakukan. Menurut Campbell (dalam Stress 1985:46) pengukuran efektivitas

secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- Keberhasilan Program.
- Keberhasilan Sasaran.
- Kepuasan Terhadap Program.
- Tingkat input dan output.
- Pencapaian tujuan menyeluruh.

Budiani (2007:53) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada

masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.

3. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan (dalam Streers 1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu

kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang konkret.

4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya.
5. Selanjutnya menurut Bohari (1992:3) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian (dalam Situmorang Dkk 1993:19) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Syah Harrofiyev	Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau
2	Heryani, S.ST	Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru
3	Bambang Rifai, A.md, SE	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Pekanbaru
4	Azwar	Sekretaris Lurah Tangkerang Labuai
5	Helmi Burman, Hamdani, Achmad Rusdi	RT/RW Kelurahan Tangkerang Labuai
6	Iyet, Tini, Masniati, Purnomo, Sarifah, Rika, Siti Ruminah, Imron	Masyarakat Penerima BLT

Jumlah	15
--------	----

Sumber : Data olahan penulis, 2021

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BLT akan disalurkan melalui rekening bank yang telah ditunjuk dan akan diberikan kepada warga negara WNI khususnya yang datanya telah terdaftar sebagai KPM. Data berdasarkan yang telah diajukan dari bawah, Dinas Sosial yang melaksanakan inputan dan sebagainya. BLT akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

Jumlah penerima secara keseluruhan dari tiap Kecamatan serta Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, pada tahap I 29.662 dengan dana sebesar Rp8.898.600.000,00. Pada tahap II 22.876 dengan dana sebesar Rp6.862.800.000,00 serta juga dapat diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah KPM.

Penyaluran tahap I dilakukan dari bulan Mei 2020 sampai September 2020. Tiga bank yang telah ditunjuk menyalurkan satu tahap dulu sampai selesai serta laporan selesai, setelah itu baru dilakukan penyaluran tahap selanjutnya yaitu tahap II pada bulan September 2020 sampai Desember 2020. Antara tahap I dan tahap II terjadi perbedaan jumlah KPM, lebih tepatnya penurunan jumlah pada tahap II. Hal ini

disebabkan; Pertama, karena pada tahap I orang dari luar daerah Pekanbaru yang tinggal di Kota Pekanbaru bisa mendapatkan BLT dengan mempunyai surat keterangan domisili. Kemudian berjalannya waktu ada pemberitahuan bahwa penerima BLT Provinsi harus penduduk Kota Pekanbaru, yang di mana harus mempunyai identitas Kota Pekanbaru, KK asli dan KTP asli.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penerimaan 2 kali karena BLT Provinsi Riau disalurkan pada seluruh Kab/Kota yang ada di Riau. Kedua, kepala keluarganya meninggal digantikan istri maupun anaknya yang satu KK. Ketiga, pengambilan tidak bisa diwakilkan karena pada tahap II dikasih kesempatan untuk penggantian apabila yang tercantum berhalangan atau sedang tidak ada ditempat pada saat pengambilan BLT, istrinya boleh sebagai penerima. Namun kebanyakan dari KPM mencantumkan nama kepala keluarganya langsung, sehingga tidak bisa melakukan pengambilan di Bank, karena pihak Bank memberikan sesuai dengan data yang telah tercantum.

Masyarakat penerima bantuan khususnya di lingkungan Kelurahan Tangkerang Labuai sudah menerima berbagai bantuan baik tunai maupun non tunai (sembako) pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh Provinsi Riau kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

bahwa pemerintah sudah berupaya dan berperan aktif dalam membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari bantuan yang diberikan pemerintah, baik yang sumber dananya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada berbagai bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi yaitu bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu Prakerja, subsidi gaji karyawan, BLT usaha mikro kecil, serta BLT Pemprov Riau.

Dalam hal ini Pemprov Riau hanya sebagai penyedia anggaran dan melakukan validasi data yang diserahkan oleh Kabupaten dan Kota.

Berdasarkan paparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa tiap kabupaten/kota memiliki besaran jumlah yang berbeda-beda dikarenakan data yang diberikan tiap kabupaten/kota berbeda, ada yang membutuhkan lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan bersifat khusus digunakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas pengaman untuk masyarakat terdampak COVID-19 dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Untuk Kota Pekanbaru, Provinsi menetapkan jumlah penerima bantuan langsung tunai di Kota Pekanbaru sebanyak 29.662 KPM dengan nilai bantuan sebesar sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala

Keluarga Per Bulan selama 2 (dua bulan) dan dapat diperpanjang sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran alokasi bantuan yang disalurkan Pemprov Riau dipastikan sudah sesuai usulan data Pemkab dan Pemko.

Setiap program pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, termasuk pemberian dana BLT yang bersumber dari pemerintah provinsi Riau kepada seluruh masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 ini. Di mana pada masa pandemi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Tingkat pengangguran serta kemiskinan yang melonjak, pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan kepada 29.662 KPM di Kota Pekanbaru termasuk di Kelurahan Tangkerang Labuai sebanyak 430 KPM di tahap I dan 351 KPM di tahap II. Masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah masa pandemi dan mereka yang rentan terkena dampak dari adanya pandemi ini.

Di Kelurahan Tangkerang Labuai, banyak sekali warga masyarakat yang mengalami dampak dari adanya wabah virus COVID-19. Dampak yang terjadi diantaranya seperti banyak dari warga yang mengalami kasus Pemutusan Hubungan Kerja, penurunan jam kerja, bagi masyarakat yang berwirausaha mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan tutupnya usaha mereka. Dalam suatu program dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari program tersebut dapat dicapai sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana sesuai rencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dari Pemerintah Provinsi Riau Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan 4 indikator efektivitas, sosialisasi program yang dilakukan cukup maksimal. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BLT Pemprov Riau sebagian besar sudah pernah mengikuti kegiatan sosialisasi. Indikator ketepatan sasaran belum dilakukan dengan maksimal. Karena masih adanya yang mengeluhkan hal terkait ketepatan sasaran program BLT Pemprov Riau. Indikator pencapaian tujuan belum dilakukan dengan maksimal. Karena melihat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak lancar dalam penerimaan bantuannya. Indikator pemantauan program Karena melihat tidak adanya kegiatan pemantauan program yang dilakukan dengan maksimal. Tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Tangkerang Labuai yang dapat melaporkan masalah dalam hal penyaluran BLT Pemprov dengan mudah, banyak yang tidak mengetahui melapor ke siapa dan seperti apa mekanisme pengaduannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Araf Riau Dahrendorf, R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggara Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etta Mamang Sangadji. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Firyal Akbar, Muh., dan Widya Kurniati Mohi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hidayat. (1986). *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kasim, Azhar. (1993). *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lubis, H dan Hussein, M. (2009). *Efektivitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Mulyadi, Puradiredja, K. (1998). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- _____. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, Wayne. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Parsolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Singarimbun, M dan Efendi, 1995, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Steers, R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2007). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERCA.
- Wahab Abdul Solichin. (2016). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Wirawan. (2012). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Rajawali Press.
- Yuwono, T. (2016). *Pandangan Sosiologi tentang Kebijakan Pemerintahan dan Good Governance*. Dalam R. Martini, *Sosiologi Pemerintahan*. Banten: Universitas Terbuka
- Skripsi dan Jurnal
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna*”Eka Taruna Bhakti”. Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1.
- Fernando, Carly Erfly. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 9(2).
- Fitria, Fadhila Nur dkk. (2020). “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020”, Jurnal Politikom Indonesiana Vol 6(1).
- Melati, dan H. Zulkarnaini. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kelurahan Pasir Pengaraian*. Jurnal Publicuho Vol 4(1).
- Hanum, Sarifa. (2019). *"Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Johor"*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Harwidiensyah. (2011). *"Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa"*. Skripsi. Makasar: UIN Alauddin.
- Herdiana, Dian. (2020). *Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak COVID-19*. Jurnal Dinamika Pemerintahan Vol 3(2).
- Luas, Jesicca Dkk. (2017). “Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2(2).
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suulun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”, Vol 9(2).
- Putra, Agung Aldino. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama)*. Jurnal Katalogis, Vol 6 (8).
- Ramdhani, Abullah dan Muhammad Ali Ramdhani. (2017). *Konsep Umum*

- Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Public Vol 11(1).
- Rosadi, Cahaya 2021. "Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang". Sripsi. Jakarta: UIN.
- Sihotang, Santy Aji dkk. (2020). "Efektivitas Penerapan Kebijakan Trading Halt Dalam Mencegah Panic Selling Akibat Pandemi Covid - 19 (Study Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020". Jurnal Ilmiah Simantek Vol 5 (4).
- Wayan Tagel Winarta, dkk. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Jurnal Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 (1).
- Peraturan Perundang-undangan
- UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Keputusan Presiden (KEPPRES) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/Pmk.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Nomor: Kpts. 39 /Dinsos/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2020.
- Media**
- "Data Calon Penerima BLT Sudah Valid, Pemko Pekanbaru Segera Ajukan ke Pemprov Riau". Diambil dari Cakaplah.com: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/5>

- 3602/2020/05/12/data-calon-penerima-blt-sudah-valid-pemko-pekanbaru-segera-ajukan-ke-pemprov-riau/
- "Dibagikan Lewat Bank, Bantuan Sosial Warga Terdampak Covid-19 di Pekanbaru Kena Sunat". (2020). Diambil dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4293787/dibagikan-lewat-bank-bantuan-sosial-warga-terdampak-covid-19-di-pekanbaru-kena-sunat>
- "Ditolak Bank Hingga Dinsos Lepas Tangan, Warga Pekanbaru Merasa Rugi Dapat BLT COVID-19". Diambil dari <https://www.lamanriau.com/2020/07/10/ditolak-bank-hingga-dinsos-lepas-tangan-warga-pekanbaru-merasa-rugi-dapat-blt-covid-19/>
- "Efek Samping PSBB Terhadap Masyarakat". Diambil dari [yoursay.id: https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat](https://www.suara.com/yoursay/2020/04/16/171009/efek-samping-psbb-terhadap-masyarakat)
- "Prioritas Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19". (2020). Diambil dari [Balairungpress.com: https://www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-covid-19/](https://www.balairungpress.com/2020/04/prioritas-kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-pandemi-covid-19/)
- "Penyaluran BLT Pemprov Riau Terkendala Data Dari Daerah". Diambil dari [riau.antaranews.com: https://riau.antaranews.com/berita/184337/penyaluran-blt-pemprov-riau-terkendala-data-dari-daerah](https://riau.antaranews.com/berita/184337/penyaluran-blt-pemprov-riau-terkendala-data-dari-daerah)
- "Kemensos Siapkan "Social Safety Net" untuk KPM Hadapi COVID-19". Diambil dari [kemensos.go.id: https://kemensos.go.id/kemensos-siapkan-social-safety-net-untuk-kpm-hadapi-covid-19](https://kemensos.go.id/kemensos-siapkan-social-safety-net-untuk-kpm-hadapi-covid-19)
- "Penerima Bantuan Pemprov Bisa Juga Mendaftar Online". Diambil dari [RiauPos.com: https://riapos.jawapos.com/riau/16/04/2020/229520/penerima-bantuan-pemprov-bisa-juga-mendaftar-online.html](https://riapos.jawapos.com/riau/16/04/2020/229520/penerima-bantuan-pemprov-bisa-juga-mendaftar-online.html)
- "Potongan Rp50 Ribu Dana BLT, Dewan Akan Laporkan ke Kejaksaan". Diambil dari [amanahnews.com: https://amanahnews.com/read/detail/64844/dewan-akan-lapor-ke-kejaksaan](https://amanahnews.com/read/detail/64844/dewan-akan-lapor-ke-kejaksaan)
- "Warga Laporkan Dana BLT Corona Dipotong, Pemprov Riau: Tidak Ada Pemotongan". Diambil dari [detikNews.com: https://news.detik.com/berita/d-5075859/warga-lapor-dana-blt-corona-dipotong-pemprov-riau-tidak-ada-pemotongan](https://news.detik.com/berita/d-5075859/warga-lapor-dana-blt-corona-dipotong-pemprov-riau-tidak-ada-pemotongan)
- "Warga Protes Aturan BLT". Diambil dari [riapos.jawapos.com: https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/26/06/2020/233926/warga-protes-aturan-blt.html](https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/26/06/2020/233926/warga-protes-aturan-blt.html)